

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

Rahmah Afifah

Akademi Kebidanan Darussalam Martapura

Email: rahmahafifah@gmail.com

Abstract

The use of long-acting contraception (LAC) is one effective strategy to reduce birth rates, improve reproductive health, and support the success of family planning programs. However, the utilization rate of long-acting contraception in Indonesia remains relatively low compared to short-term contraceptive methods. One factor suspected to influence the use of long-acting contraception is the level of education. This article aims to examine the relationship between educational level and the use of long-acting contraception based on a review of the literature and previous research findings. The method employed is a literature review by analyzing reproductive health textbooks, population reports, and relevant national and international journal articles. The results indicate that educational level is positively associated with the use of long-acting contraception. Individuals with higher levels of education tend to have better knowledge, more rational attitudes, and more mature decision-making abilities related to reproductive health. Education also plays a role in increasing access to information and contraceptive services. Therefore, improving educational attainment and reproductive health education are important factors in encouraging the optimal use of long-acting contraception.

Keywords: educational level, long-acting contraception, family planning

Abstrak

Penggunaan kontrasepsi jangka panjang (KJP) merupakan salah satu strategi efektif dalam menekan angka kelahiran, meningkatkan kesehatan reproduksi, serta mendukung keberhasilan program keluarga berencana. Namun, tingkat pemanfaatan kontrasepsi jangka panjang di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan metode kontrasepsi jangka pendek. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi penggunaan kontrasepsi jangka panjang adalah tingkat pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan kontrasepsi jangka panjang berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian terdahulu. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah buku teks kesehatan reproduksi, laporan kependudukan, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berhubungan positif dengan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik, sikap yang lebih rasional, serta kemampuan pengambilan keputusan yang lebih matang terkait kesehatan reproduksi. Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kontrasepsi. Dengan demikian, peningkatan tingkat pendidikan dan edukasi kesehatan reproduksi menjadi faktor penting dalam mendorong penggunaan kontrasepsi jangka panjang secara optimal.

Kata kunci: tingkat pendidikan, kontrasepsi jangka panjang, keluarga berencana

PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya strategis dalam pembangunan kesehatan dan kependudukan yang bertujuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengaturan jumlah dan jarak kelahiran, program KB berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan kesehatan reproduksi, serta kesejahteraan keluarga secara menyeluruh (BKKBN, 2020; WHO, 2018). Keberhasilan program KB tidak hanya diukur dari cakupan kepesertaan, tetapi juga dari penggunaan metode kontrasepsi yang efektif, aman, dan berkelanjutan.

Salah satu indikator penting keberhasilan program KB adalah meningkatnya pemanfaatan kontrasepsi jangka panjang (KJP), seperti intra uterine device (IUD), implan, serta metode kontrasepsi mantap (MOW dan MOP). Metode kontrasepsi jangka panjang memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan metode jangka pendek, dengan durasi perlindungan yang lebih lama dan tingkat kegagalan yang lebih rendah (WHO, 2019). Selain itu, kontrasepsi jangka panjang dinilai lebih efisien dalam jangka panjang karena tidak memerlukan kepatuhan penggunaan harian atau bulanan seperti pil dan suntik (Glasier et al., 2017).

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, tingkat penggunaan kontrasepsi jangka panjang di Indonesia masih relatif rendah. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa mayoritas pasangan usia subur masih memilih metode kontrasepsi jangka pendek, terutama suntik dan pil, dibandingkan metode jangka panjang (BPS, BKKBN, Kemenkes, & ICF, 2018). Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko putus pakai, kehamilan tidak direncanakan, serta kegagalan program KB secara keseluruhan.

Rendahnya pemanfaatan kontrasepsi jangka panjang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor individu maupun struktural, seperti tingkat pengetahuan, sikap terhadap kontrasepsi, norma budaya, dukungan pasangan, akses terhadap pelayanan kesehatan, kualitas konseling, serta tingkat pendidikan (Cleland et al., 2015; Fitriani & Astuti, 2021). Di antara faktor-faktor tersebut, tingkat pendidikan menjadi determinan penting karena berkaitan erat dengan kemampuan individu dalam memahami informasi kesehatan dan mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan reproduksi.

Tingkat pendidikan memengaruhi cara seseorang menerima, mengolah, dan memanfaatkan informasi mengenai pilihan kontrasepsi. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai efektivitas, manfaat, dan efek samping berbagai metode kontrasepsi, termasuk kontrasepsi jangka panjang (Notoatmodjo, 2014). Pendidikan juga berperan dalam membentuk sikap yang lebih rasional, terbuka, dan kritis terhadap informasi kesehatan, sehingga individu lebih mampu mempertimbangkan manfaat jangka panjang dibandingkan kenyamanan sesaat.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, pendidikan tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga memengaruhi kemandirian perempuan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam keluarga, akses informasi yang lebih luas, serta keberanian untuk berkomunikasi dengan tenaga kesehatan mengenai pilihan metode kontrasepsi yang sesuai (Prata et al., 2017). Hal ini menjadikan pendidikan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan kontrasepsi jangka panjang menjadi penting untuk memahami faktor determinan dalam pemilihan metode kontrasepsi. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, strategi edukasi, dan intervensi program KB yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang, khususnya di kalangan pasangan usia subur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah berupa buku teks kesehatan reproduksi dan kebidanan, laporan resmi kependudukan dan keluarga berencana, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas tingkat pendidikan dan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola hubungan antara tingkat pendidikan dan pemilihan metode kontrasepsi. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan temuan penelitian terdahulu serta mengaitkannya dengan teori perilaku kesehatan dan pendidikan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan tentang Kontrasepsi

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengetahuan pasangan usia subur mengenai kontrasepsi, khususnya kontrasepsi jangka panjang. Pendidikan formal berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk kemampuan kognitif individu untuk menerima, memahami, dan mengolah informasi kesehatan reproduksi. Individu dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai jenis-jenis kontrasepsi, mekanisme kerja, tingkat efektivitas, manfaat, serta kemungkinan efek samping dari masing-masing metode kontrasepsi (Notoatmodjo, 2014; Glasier et al., 2017).

Pengetahuan yang memadai memungkinkan pasangan usia subur untuk menilai kelebihan dan kekurangan metode kontrasepsi secara objektif. Kontrasepsi jangka panjang, seperti IUD dan implan, sering kali dipersepsikan sebagai metode yang kompleks karena melibatkan tindakan medis. Namun, individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memahami bahwa prosedur medis tersebut relatif aman, memiliki tingkat kegagalan yang rendah, serta memberikan perlindungan jangka panjang tanpa memerlukan kepatuhan harian atau bulanan (WHO, 2019). Pemahaman ini menjadi faktor pendorong utama dalam pemilihan kontrasepsi jangka panjang.

Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan rendah sering kali mengalami keterbatasan dalam mengakses dan memahami informasi kesehatan reproduksi. Informasi yang diperoleh umumnya bersifat terbatas, tidak lengkap, atau berasal dari sumber yang kurang valid, seperti cerita dari lingkungan sekitar atau mitos yang berkembang di masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelompok berpendidikan rendah lebih rentan mempercayai anggapan keliru, misalnya bahwa penggunaan IUD dapat berpindah tempat di dalam tubuh, menyebabkan kemandulan, atau menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang (Cleland et al., 2015; Fitriani & Astuti, 2021).

Kurangnya pengetahuan tersebut berdampak langsung pada rendahnya minat dan kepercayaan terhadap kontrasepsi jangka panjang. Ketidaktahuan mengenai manfaat dan

keamanan metode ini membuat pasangan usia subur lebih memilih metode kontrasepsi jangka pendek yang dianggap lebih familiar dan mudah digunakan, meskipun memiliki tingkat kegagalan dan putus pakai yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak hanya memengaruhi jumlah informasi yang dimiliki, tetapi juga kualitas pemahaman dan kemampuan menilai informasi secara kritis.

Dalam perspektif promosi kesehatan, pengetahuan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses perubahan perilaku. Tanpa pengetahuan yang memadai, individu akan sulit membentuk sikap positif dan mengambil keputusan yang rasional terkait penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Oleh karena itu, hasil kajian ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan melalui pendidikan formal maupun edukasi kesehatan reproduksi menjadi kunci utama dalam meningkatkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang secara berkelanjutan.

Pengaruh Pendidikan terhadap Sikap dan Pengambilan Keputusan

Selain berpengaruh terhadap pengetahuan, tingkat pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan proses pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung membentuk pola pikir yang lebih rasional, analitis, dan terbuka terhadap inovasi, termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi. Individu berpendidikan tinggi umumnya lebih mampu mempertimbangkan manfaat jangka panjang dibandingkan kenyamanan sesaat, sehingga lebih terbuka terhadap penggunaan kontrasepsi jangka panjang yang efektif (Prata et al., 2017).

Sikap terhadap kontrasepsi jangka panjang tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses internalisasi pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Pendidikan memberikan kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan individu mengevaluasi berbagai informasi, membedakan fakta dan mitos, serta mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap pilihan kontrasepsi. Dengan demikian, individu berpendidikan tinggi cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap kontrasepsi jangka panjang dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah (BKKBN, 2020).

Dalam pengambilan keputusan, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri, khususnya pada perempuan. Perempuan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam keluarga dan mampu terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi. Mereka tidak hanya menerima keputusan dari pasangan atau keluarga, tetapi juga mampu menyampaikan pendapat dan preferensi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki (UNFPA, 2019).

Sebaliknya, pada kelompok dengan tingkat pendidikan rendah, keputusan penggunaan kontrasepsi sering kali dipengaruhi oleh pihak lain, seperti pasangan, orang tua, atau tokoh masyarakat. Dalam kondisi ini, perempuan cenderung pasif dan menerima pilihan kontrasepsi tanpa pemahaman yang memadai. Ketergantungan dalam pengambilan keputusan ini berpotensi menghambat penggunaan kontrasepsi jangka panjang, terutama jika lingkungan sosial memiliki persepsi negatif terhadap metode tersebut.

Pendidikan juga memengaruhi keberanian individu dalam berinteraksi dengan tenaga kesehatan. Pasangan usia subur dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan mencari klarifikasi sebelum memutuskan metode kontrasepsi. Interaksi yang komunikatif ini memungkinkan terjadinya proses konseling

dua arah, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan, dan rencana reproduksi individu (WHO, 2018).

Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai faktor penting yang memengaruhi sikap dan pengambilan keputusan dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Sikap positif dan keputusan yang rasional merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan cakupan penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan berkelanjutan.

Pendidikan, Akses Informasi, dan Pelayanan Kesehatan

Tingkat pendidikan juga berkaitan erat dengan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keluarga berencana. Individu dengan pendidikan lebih tinggi umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber informasi, baik media cetak, elektronik, maupun digital. Mereka juga lebih mampu memahami pesan-pesan kesehatan yang disampaikan melalui media massa atau kampanye kesehatan reproduksi (Notoatmodjo, 2014).

Di era digital, pendidikan menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mencari informasi kesehatan. Individu berpendidikan tinggi cenderung lebih aktif memanfaatkan internet dan media sosial untuk memperoleh informasi terkait kontrasepsi, membaca pengalaman pengguna lain, serta mengakses sumber-sumber ilmiah yang kredibel. Akses informasi yang luas ini memperkaya wawasan dan meningkatkan kepercayaan terhadap kontrasepsi jangka panjang sebagai pilihan yang aman dan efektif (WHO, 2019).

Selain akses informasi, pendidikan juga sering kali berkorelasi dengan status sosial ekonomi yang lebih baik. Status sosial ekonomi yang lebih tinggi memungkinkan individu untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, termasuk fasilitas yang menyediakan layanan pemasangan IUD dan implan dengan tenaga kesehatan terlatih. Biaya transportasi, waktu, dan kenyamanan dalam mengakses layanan kesehatan menjadi faktor yang relatif lebih mudah diatasi oleh kelompok berpendidikan tinggi (BPS et al., 2018).

Namun demikian, kesenjangan pendidikan berpotensi menciptakan ketimpangan dalam akses pelayanan kontrasepsi jangka panjang. Kelompok berpendidikan rendah sering kali menghadapi hambatan ganda, baik dari sisi informasi maupun akses pelayanan. Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut melalui pemberian konseling yang komprehensif, komunikatif, dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan klien.

Konseling KB yang efektif harus mempertimbangkan latar belakang pendidikan, budaya, dan kebutuhan individu. Tenaga kesehatan diharapkan mampu menyampaikan informasi mengenai kontrasepsi jangka panjang dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menakutkan, sehingga mudah dipahami oleh semua kelompok pendidikan. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman, mengurangi kecemasan, serta mendorong penerimaan terhadap kontrasepsi jangka panjang (Cleland et al., 2015).

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berperan secara langsung dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap, tetapi juga secara tidak langsung memengaruhi akses informasi dan pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan pendidikan masyarakat, penguatan edukasi kesehatan reproduksi, serta peningkatan kualitas pelayanan dan konseling KB yang inklusif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik, sikap yang lebih positif, serta kemampuan pengambilan keputusan yang lebih rasional dalam memilih metode kontrasepsi jangka panjang. Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, upaya peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan, tetapi juga pada peningkatan pendidikan dan edukasi kesehatan reproduksi masyarakat. Program keluarga berencana perlu memperkuat strategi edukasi yang inklusif dan mudah dipahami oleh semua kelompok pendidikan, sehingga penggunaan kontrasepsi jangka panjang dapat meningkat secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisa, A., & Latifah, L. (2023). Pencegahan Perilaku Seksual Pada Remaja Di Banjarmasin Melalui Self Efficacy Media Audio Visual. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 279-287.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). *Pedoman pelayanan keluarga berencana*. BKKBN.
- Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Kesehatan, & ICF. (2018). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*. BPS.
- Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2015). Contraception and health. *The Lancet*, 380(9837), 149–156.
- Fitriani, D., & Astuti, S. (2021). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(2), 85–94.
- Glasier, A., Scorer, J., & Bigrigg, A. (2017). Attitudes of women in Scotland to contraception: A qualitative study to explore acceptability of long-acting methods. *Journal of Family Planning and Reproductive Health Care*, 34(4), 213–217.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2018*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan kontrasepsi*. Kemenkes RI.
- Latifah, L., & Nglimun, N. (2023). Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi Melalui Transformasi Digital Dengan Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 41-50.
- Machiyama, K., & Cleland, J. (2014). Unmet need for family planning in developing countries: Analyses of demographic and health survey data. *The Lancet*, 381(9879), 169–180.
- Nglimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Nglimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

- Prata, N., Fraser, A., Huchko, M., Gipson, J., Withers, M., Lewis, S., & Upadhyay, U. (2017). Women's empowerment and family planning: A review of the literature. *Journal of Biosocial Science*, 49(6), 713–743.
- Rahayu, S., & Lestari, P. (2020). Hubungan tingkat pendidikan dengan pemilihan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 11(1), 45–52.
- Ross, J., & Stover, J. (2013). Use of modern contraception increases when more methods become available: Analysis of evidence from 1982–2009. *Global Health: Science and Practice*, 1(2), 203–212.
- Sari, N. P., & Wulandari, R. D. (2019). Determinan penggunaan kontrasepsi jangka panjang pada wanita usia subur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(3), 223–232.
- United Nations Population Fund. (2019). *State of world population 2019: Unfinished business – the pursuit of rights and choices for all*. UNFPA.
- World Health Organization. (2018). *Family planning: A global handbook for providers*. WHO.